

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem Otonomi Daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintah dan ruang lingkup pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan penghindaran salah alokasi dana investasi serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Di Indonesia, salah satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk dapat melaksanakan efisiensi dan efektifitas anggaran. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi merupakan salah satu jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut.

Dalam perkembangannya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak lepas dari sistem yang mengatur setiap kegiatan operasionalnya. Sebuah sistem yang baik akan menghasilkan *output* yang baik pula, namun dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas masih ada kasus penyelewengan yang dilakukan pihak terkait. Salah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



satu contoh kasus yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh 5 orang pegawai wanita di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2 diantaranya yang menjabat di Bidang Keuangan dan Sekretaris. Tiga orang merupakan Bendahara di Bidang lainnya. Kasus korupsi ini terjadi pada rentang tahun 2015-2016 yang menyebabkan kerugian 1,23 Miliar. Modusnya memotong sejumlah pos-pos anggaran sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan (Tribun.com, 2018).

Berdasarkan kasus diatas, pemerintahan harus mengendalikan kas mulai dari diterimanya hingga disetor ke bank. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, uang kas merupakan asset pemerintahan yang paling lancar dibandingkan dengan asset lainnya dan hampir setiap transaksi dipengaruhi oleh kas. Karena sifat kas yang lancar (*liquid*) maka mudah diselewengkan, sehingga pihak terkait harus menerapkan beberapa pengendalian yang salah satunya adalah pengendalian intern dengan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dalam SAP Nomor 71 Tahun 2010 Fungsi pengendalian dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penerimaan kas harus memiliki sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





yaitu berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 55 Tahun 2008 dimana pencatatan dilakukan saat bendahara penerimaan menerima informasi Bendahara Umum Daerah mengenai adanya penerimaan pendapatan pada rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan.

Defenisi Sistem Pengendalian intern menurut IAI (2001: 319.2) dalam buku Agoes, Sukrisno (2004: 79) mendefenisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kas merupakan aktiva yang paling liquid, merupakan media pertukaran standard dan dasar pengukuran yang terdiri dari uang logam, uang kertas dan dana yang tersedia pada deposito di bank. Kas adalah asset yang sangat mudah diselewengkan, ditipu, dan digelapkan. Oleh karena itu, kas perlu diawasi sehingga instansi-instansi pemerintahan terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh kasus penyelewengan kas tersebut yang kerugiannya mencapai Rp1,23 Miliar hal ini dapat merusak nama baik Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan juga berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Dengan adanya sistem pengendalian intern dalam pemerintahan sangat diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait (Tribun.com, 2018). Apabila

pengendalian intern terhadap kas dalam pemerintahan efektif maka segala penyelewengan akan mudah terungkap.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui penerapan sistem pencatatan dan pengendalian intern kas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak pada pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berjudul Analisis Sistem Pencatatan dan Pengendalian Intern Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut
 “Bagaimana sistem pencatatan dan pengendalian intern kas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sistem pencatatan dan pengendalian intern kas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Yaitu untuk memberikan informasi untuk keputusan tentang sistem pencatatan dan pengendalian kas.

b. Bagi Akademis

Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan skripsi metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai No.81 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk mentah atau belum diolah (Uma sekaran,2011)

2) Data Sekunder

Data yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi seperti dokumen sejarah singkat berdirinya perusahaan serta struktur organisasi perusahaan (Uma sekaran,2011)





b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini penulis dapatkan dari Bendahara bagian keuangan dan bagian program pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg dalam buku Sugiyono (2013: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

b. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013: 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan (*life histories*), cerita biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar

hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas, maka penulis membagi menjadi 4 bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan yang menjadi objek penelitian, yang terdiri dari profil atau sejarah, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, uraian pekerjaan (*job description*) Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang tinjauan teori dan praktek yaitu mengenai pengertian sistem pencatatan penerimaan kas, sistem pencatatan pengeluaran kas sistem pengendalian, unsur-unsur dan tujuan pengendalian, sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas. Dilanjutkan dengan



pembahasan praktek sistem pencatatan dan pengendalian intern kas

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan penulis sebagai masukan bagi perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan berdasarkan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.